

TAHAPAN KEMUNCULAN GERAKAN SOSIAL PENOLAKAN TAMBANG DI KONAWA KEPULAUAN

Wa Ode Sitti Mardiana¹, Susetiawan², Mulkhaeri Ikram³

^{1,3}Universitas Musamus, Jl. Kamizaun, Mopah Lama, Merauke, Papua Selatan, Indonesia

²Universitas Gadjah Mada, Jl. Bulaksumur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

Email: wsmardiana@unmus.ac.id

Article History

Received: 16-06-2025

Revision: 28-06-2025

Accepted: 02-07-2025

Published: 07-07-2025

Abstract. This study discusses the form of the initial emergence of social movements carried out by the community in order to reject mining activities in the Konawe Islands region. The community carried out various forms of action as a form of rejection of government policies that were considered detrimental. Through the unification of forces in an organization called the Southeast Sulawesi People's Front Bela Wawonii (FRSBW), the community has a forum to voice their aspirations and concerns about the potential negative impacts of the presence of mining companies. This study uses social movement analysis according to Macionis, which groups social movements into three stages: the initial stage (emergence), the consolidation stage (coalescence), and the goal achievement stage. The research approach used is qualitative, with data collection techniques through field observations of community resistance actions against the entry of mining activities on Wawonii Island. Data analysis is conducted qualitatively through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research findings indicate that the emergence of this movement is born from the public's concerns and various issues circulating regarding the threats posed by mining activities, especially since Wawonii Island is categorized as a small island that is vulnerable to the dangers of mining impacts.

Keywords: Emergence, Social Movement, Rejection, Mining

Abstrak. Penelitian ini membahas mengenai bentuk kemunculan awal gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka menolak aktivitas pertambangan di wilayah Konawe Kepulauan. Masyarakat melakukan berbagai bentuk aksi sebagai wujud penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan. Melalui penyatuan kekuatan dalam sebuah organisasi bernama Front Rakyat Sultra Bela Wawonii (FRSBW), masyarakat memiliki wadah untuk menyuarakan aspirasi serta kekhawatiran mereka terhadap potensi dampak negatif dari kehadiran perusahaan tambang. Penelitian ini menggunakan analisis gerakan sosial menurut Macionis, yang mengelompokkan gerakan sosial ke dalam tiga tahap: tahap awal (*emergence*), tahap konsolidasi (*coalescence*), dan tahap pencapaian tujuan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan terhadap aksi perlawanan masyarakat atas masuknya aktivitas tambang di Pulau Wawonii. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kemunculan gerakan ini lahir dari keresahan masyarakat dan berbagai isu yang beredar mengenai ancaman yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan, terutama karena Pulau Wawonii termasuk dalam kategori pulau kecil yang rentan akan bahaya dari dampak pertambangan.

Kata Kunci: Kemunculan, Gerakan Sosial, Penolakan, Tambang

How to Cite: Mardiana, W. O. S., Susetiawan., & Ikram, M. (2025). Tahapan Kemunculan Gerakan Sosial Penolakan Tambang di Konawe Kepulauan. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 6 (4), 5273-5279. <http://doi.org/10.54373/imeij.v6i4.3476>

PENDAHULUAN

Kasus penolakan dan perlawanan masyarakat lokal terhadap aktivitas pertambangan di Indonesia mulai mengalami peningkatan intensitas yang sangat signifikan terutama setelah reformasi politik 1998 (Prayogo, 2008). Aktivitas praktik pertambangan juga terjadi di pulau kecil dan wilayah pesisir dan menjadi suatu gambaran bahwa pulau kecil rentan mengalami kerusakan dan berpotensi memakan korban jiwa. Adapun strategi masyarakat dalam melindungi pulau-pulau kecil dari kerusakan lingkungan akibat praktik pertambangan berbeda-beda. Setiap daerah memiliki cara tersendiri dalam menolak kebijakan pemerintah atas hadirnya bisnis ekstraktif di wilayahnya. Strategi dan bentuk penolakan yang dilakukan masyarakat di setiap daerah yang protes terhadap kehadiran tambang dapat berbeda-beda. Salah satu pulau kecil dan wilayah pesisir yang saat ini menjadi sorotan akibat praktik penambangan adalah Pulau Wawonii yang terletak di Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pulau Wawonii merupakan salah satu wilayah di Indonesia dengan kekayaan sumber daya mineral berupa nikel. Pulau ini berpenduduk 31.688 jiwa (berdasarkan data 2015) dan terdiri dari beragam suku yang hidup berdampingan diantaranya suku Tolaki, suku Kulisusu (Buton Utara), suku Buton, suku Bugis, dan suku Jawa. Potensi pertanian yang ada di desa ini adalah kelapa. Berdasarkan data pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan 2016, kelapa merupakan komoditas paling mendominasi dengan luas 9.798,72. Sebagian besar komoditas kelapa ini berada di kecamatan Wawonii Tenggara, dimana daerah seluas 3.108 hektar ini menjadi pusat penambangan (Rido, 2020). Menurut data profil daerah, Konawe Kepulauan hanya memiliki wilayah daratan 867,58 km² dan masuk dalam daftar pulau kecil (Kominfo Konawe Kepulauan, 2017). Keberadaan tambang di pulau ini menjadi polemik baru di tengah masyarakat karena dianggap sebagai ancaman bagi keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat. Juru bicara JATAM, Melky Nahar berpandangan bahwa dengan keberadaan tambang maka Konawe Kepulauan terancam lenyap (BBC News, 2019). Sektor pertambangan yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, namun disisi lain kegiatan pertambangan telah menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang memicu konflik sosial (Ardiyanto, 2016).

Keberadaan perusahaan tambang disuatu daerah memiliki pro dan kontra, dimana mampu meningkatkan pendapatan daerah, namun dilain sisi keberadaan tambang memiliki potensi bahaya yang ditimbulkan akibat eksploitasi yang berlebihan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketika eksploitasi yang dilakukan tidak sesuai prosedur pertambangan tentunya menyulut aksi protes di masyarakat. Hal ini tentunya memicu konflik, baik antara

pemerintah dengan masyarakat, korporasi dengan masyarakat, dan juga masyarakat yang resisten dan masyarakat yang persisten di Konawe Kepulauan. Keresahan ini kemudian melahirkan suatu gerakan dalam upaya penolakan terhadap proses penambangan.

Gerakan sosial lahir dari situasi dalam masyarakat karena adanya ketidakadilan dan sikap sewenang-wenang terhadap masyarakat (Tarrow, 2008). Disini terlihat tuntutan atau protes masyarakat itu lahir karena melihat kebijakan yang ada tidak sesuai dengan konteks masyarakat yang ada maupun bertentangan dengan Undang-Undang Pertambangan “wilayah dengan luas daratan dibawah 2000 KM tidak diperbolehkan masuknya aktivitas pertambangan”. Dengan keterlibatan berbagai pihak telah menunjukkan bahwa gerakan ini semakin lama semakin besar. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui dinamika pergerakan masyarakat Wawonii terkait kasus tambang nikel, sehingga akan dilakukan penelitian dengan judul “Tahapan Kemunculan Gerakan Sosial Penolakan Tambang di Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara”. Penelitian ini menganalisis bagaimana proses kemunculan gerakan sosial masyarakat Konawe Kepulauan melakukan perlawanan terkait penolakan tambang nikel di Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang mengacu pada Strauss dan Corbin bahwa penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian dengan prosedur penemuan yang dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi tetapi penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku, fungsi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan timbal balik. Dalam hal ini mengamati awal kemunculan gerakan sosial pada penolakan keberadaan tambang di Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN DISKUSI

Konawe Kepulauan atau yang sering disebut sebagai Pulau Wawonii ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Konawe pada 12 April 2013. Pulau Wawonii dengan luas wilayah 867 km persegi adalah wilayah yang sangat strategis dengan berbagai potensi yang dimilikinya. Sehingga keberadaan bisnis ekstraktif tidak menarik simpatik warga. Selain potensi yang dimiliki, penolakan warga terhadap hadirnya tambang adalah potensi musibah. penolakan masyarakat terhadap keberadaan tambang ini diwarnai dengan perlawanan dalam bentuk

gerakan sosial. Munculnya Gerakan Sosial di Konawe Kepulauan berawal dari tahun 2018. Kemunculan gerakan sosial diawali suatu persepsi bahwa segalanya tidak baik (*all is not well*) yang memicu suatu reaksi dari sebuah permasalahan yang tidak diinginkan masyarakat. Kesadaran yang dipelopori oleh kelompok-kelompok kecil tentang beberapa isu tertentu muncul sebagai bentuk reaksi dari kebijakan yang dihadirkan tidak sesuai dengan konteks masyarakat yang ada atau telah bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara umum. Sehingga memicu munculnya perlawanan yang diprakarsai masyarakat dalam menuntut perubahan kebijakan atau struktur pemerintahan (Macionis, dalam Oman Sukmana, 2016:37). Sejalan dengan pemikiran Macionis, temuan dari kemunculan gerakan sosial di Konawe Kepulauan ini berawal dari kebijakan yang dihadirkan bertentangan dengan keinginan masyarakat, yang menentang masuknya bisnis ekstraktif di wilayah Konawe Kepulauan. Izin Usaha Pertambangan (IUP) pertama kali dikeluarkan oleh Bupati Konawe, yang saat itu dijabat oleh Lukman Abu Nawas. Terdapat 16 izin usaha pertambangan yang ditandatangani langsung oleh Lukman Abunawas selaku mantan Bupati Konawe Kepulauan yang saat ini menjabat sebagai wakil Gubernur Sulawesi Tenggara. Adapun 16 izin usaha yang beroperasi di Konawe Kepulauan diantaranya PT. Pasir Berjaya Mining, PT. Hasta Karya Megacipta, PT. Cipta Puri Sejahtera, PT. Derawan Berjaya Mining (dua izin), PT Kharisma Kreasi Abadi, PT Natanya Mitra Energi (dua izin), PT Alotama Karya, PT Bumi Konawe Mining, PT Konawe Bakti Pratama, PT Investa Pratama Intikarya, PT Kimco Citra Mandiri, PT Gema Kreasi Perdana (dua izin), dan perusahaan asing melalui penanaman modal asing (zonasultra.com). Dengan perizinan yang diperoleh sejak 2008, perusahaan mulai beraktifitas mengolah tambang di Konawe Kepulauan. Sejak awal masuknya tambang 2008 masyarakat sudah menolak. Sampai 2015 protes terhadap aktivitas pertambangan ini berujung pemenjaraan beberapa warga dan aktivis setelah membakar alat perusahaan PT Derawan Berjaya Mining. Penangkapan itu terjadi pada Minggu, 3 Mei 2015. 14 orang Warga Polara Kec. Wawonii Tenggara Kab. Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi korban dan dimarjinalkan dari tanah leluhurnya, mereka ditangkap, ditembak, dan mengalami berbagai kekerasan fisik lainnya. Penangkapan aktivis dan beberapa petani ini kemudian menjadi awal dari kemarahan masyarakat Wawonii karena merasa dikriminalisasi di tanah mereka sendiri. Awal masuknya tambang di Konawe Kepulauan, penolakan didominasi oleh masyarakat yang tinggal di daerah sekitar tambang yaitu, Kecamatan Wawonii Tenggara. Namun semakin lama semakin banyak masyarakat yang sadar bahwa bahaya tambang ini bukan hanya akan dirasakan oleh masyarakat Wawonii Tenggara, tapi seluruh masyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Awal masuknya tambang di Konawe Kepulauan, penolakan didominasi oleh masyarakat yang tinggal di daerah sekitar tambang yaitu, Kecamatan Wawonii Tenggara. Namun semakin lama semakin banyak masyarakat yang sadar bahwa bahaya tambang ini bukan hanya akan dirasakan oleh masyarakat Wawonii Tenggara, tapi seluruh masyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan. Menurut Macionis, fenomena pada masyarakat Konawe Kepulauan ini dapat diartikan sebagai *spread dissatisfaction*. Dalam konsepnya *spread dissatisfaction* terjadi melalui persepsi masyarakat akan fenomena yang terjadi sedang tidak baik yang dalam hal ini mengenai dampak buruk yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan. Hal tersebut yang kemudian dapat diartikan sebagai tahap kemunculan (*emergence*) dalam gerakan sosial masyarakat Konawe Kepulauan akan perlawanan menolak masuknya praktik pertambangan.

Setelah tahap kemunculan ini, kemudian menuju tahapan penggabungan. Dalam tahapan penggabungan ini, peran pemimpin sangat dibutuhkan. Pemimpin harus menentukan kebijakan, memutuskan suatu taktik, membangun moral, dan melakukan rekrutmen keanggotaan baru. Dalam tahap ini, gerakan terlibat dalam tindakan kolektif dan memungkinkan membentuk aliansi dengan organisasi lainnya untuk mendapatkan sumberdaya yang diperlukan (Macionis, dalam buku Oman Sukmana). Gerakan-gerakan sosial tingkat lokal yang sebelumnya terpisah, yakni Gerakan Rakyat Wawonii Menggugat (RWM) dan gerakan Persatuan Pemuda dan Mahasiswa Wawonii (PPMW) kemudian menuju tahap penggabungan. Gerakan ini awalnya hanya beranggotakan masyarakat Wawonii, namun dalam perjalanannya gerakan ini menjadi besar dan melibatkan banyak perhimpunan turut serta bergabung diantaranya adalah LPMD, KBM UHO, GPMI, RMI, STN, HMI, MPO, IMM, KAMMI, dan IMP dalam sebuah Gerakan sosial yang menamakan diri sebagai Front Rakyat Sultra Bela Wawonii (FRSBW).

Serangkaian aksi demonstrasi untuk menggugah pemerintah atas ketidaksetujuan warga terhadap praktik pertambangan telah mampu mencabut sembilan IUP dan memberhentikan sementara enam izin usaha pertambangan. Gubernur juga mengumumkan pencopotan kepada kepala satuan tugas Satpol PP yang telah melakukan tindakan kekerasan terhadap massa aksi. Perjuangan masyarakat dianggap belum 100% terpenuhi, karena izin beroperasinya perusahaan hanya dibekukan sementara, ada kemungkinan untuk beroperasi kembali. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat masyarakat untuk terus berjuang mempertahankan daerahnya dari praktik pertambangan yang dianggap banyak merugikan masyarakat Konawe Kepulauan. Ketika ada aktivitas atau kegiatan praktik pertambangan lagi maka masyarakat siap untuk melakukan perlawanan kembali. Tidak dapat dipungkiri, demonstrasi merupakan salah satu cara masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada penguasa. Kecenderungan penguasa

mengabaikan aspirasi rakyat selama ini membuat demonstrasi menjadi pilihan untuk menggugah empati penguasa. Menyitir istilah yang dikemukakan oleh Habermas, bahwa pembangkangan sipil merupakan seruan implisit untuk menghubungkan formasi kemauan politik yang diorganisir dengan proses-proses komunikatif wilayah publik, maka dalam konteks ini demonstrasi dipahami sebagai sebuah sarana rakyat dalam melakukan negosiasi terhadap kebijakan pemerintah yang dipandang merugikan kepentingan rakyat.

KESIMPULAN

Kemunculan gerakan perlawanan masyarakat dalam menolak keberadaan masuknya aktivitas pertambangan, pada awalnya hanyalah sebuah gerakan kecil yang diprakarsai aktivis lokal. Semakin lama gerakan ini semakin besar dengan bergabungnya masyarakat yang mulai paham akan dampak negatif dari masuknya perusahaan tambang di Pulau Wawonii yang hanya memiliki luas 867 KM. Beberapa aktor yang berperan penting dalam menggagalkan beroperasinya perusahaan tambang di Konawe Kepulauan ini adalah aktivis lokal beserta LSM. Kehadiran beberapa aliansi di Sulawesi Tenggara dan LSM banyak membantu masyarakat Pulau Wawonii dalam mewadahi masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum. Bentuk dukungan ini menjadi spirit tersendiri sehingga kobaran spirit perlawanan atas rasa ketidakadilan yang lahir dari penindasan negara dan pemilik modal dalam hal akses SDA tumbuh dalam diri masyarakat semakin bertambah. Berbagai gerakan aksi dilakukan oleh masyarakat Konawe Kepulauan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat. Dalam dinamikanya, masyarakat Wawonii menggabungkan kekuatan dalam suatu gerakan besar yang bernama Front Rakyat Sultra Bela Wawonii. Gerakan ini telah melahirkan simpati dari banyak pihak. Selain jumlah massa yang meningkat, kekuatan gerakan sosial ini dapat dilihat dari loyalitas masyarakat dalam keanggotaan mereka di dalam organisasi. Loyalitas itu ditunjukkan oleh masyarakat melalui swadaya anggota untuk membiayai organisasi ketika melakukan sebuah agenda gerakan. Meskipun terdapat beberapa konflik internal dalam gerakan, namun hal ini tidak melunturkan semangat perjuangan masyarakat untuk menggagalkan beroperasinya tambang.

REKOMENDASI

Terdapat beberapa rekomendasi dalam pengembangan penelitian ke depan terkait persoalan tambang yang hadir di Pulau Wawonii. Solidaritas yang terbangun masih terbilang gagal karena komunikasi dengan pihak diluar Wawonii masih menimbulkan perpecahan. Kurangnya kepercayaan yang dibangun membuat aktivis diluar Wawonii melakukan penarikan

diri. Sehingga perjuangan dalam menggagalkan beroperasinya tambang di Konawe Kepulauan ini, sekarang hanya disuarakan oleh masyarakat Wawonii yang kontra pada kehadiran tambang. Selain solidaritas dalam gerakan, persoalan komitmen pemerintah juga dalam menutup perusahaan tambang masih belum menemukan titik hasil. Belum dicabutnya seluruh IUP yang beroperasi di Wawonii, sehingga perjuangan masih terus berlanjut. Sehingga penelitian lanjut terkait keberlanjutan perjuangan masyarakat Wawonii ini dalam menggagalkan perusahaan tambang dan kebijakan pemerintah bisa menjadi agenda riset kedepan. Mampukah masyarakat Wawonii ini melanjutkan perjuangan dalam menggagalkan beroperasinya tambang ? kemudian bagaimana masyarakat mampu mengadvokasi dan mengedukasi diri mereka sendiri belajar dari pengalaman aksi yang pernah mereka lakukan dalam menutup pertambangan di Konawe Kepulauan. Lebih lanjut, melihat bagaimana keterlibatan aktor-aktor gerakan yang mendukung masyarakat Konawe Kepulauan yakni melihat apakah aktivitas gerakan yang dibangun masih mampu mengumpulkan massa dalam jumlah banyak?, dan bagaimana aktor-aktor ini mengedukasi warga dalam memahami persoalan RTRW di Konawe Kepulauan yang sampai saat ini belum ada ketetapan. Agenda riset tersebut sangat menarik untuk ditindak lanjuti, melihat sejauh mana masyarakat mampu melawan kebijakan pemerintah dalam menggagalkan beroperasinya perusahaan tambang di Wawonii yang sampai saat ini belum ada kejelasan status.

REFERENSI

- Ardyanto, T Hendra. 2016. *Mitos Tambang Untuk Kesejahteraan: Pertarungan Wacana Kesejahteraan Dalam Kebijakan Pertambangan*. Yogyakarta: Penerbit Polgov.
- Briantika, Adi. 2019. Tambang Nikel Pulau Wawonii Konawe Ditolak Warga Langgar UU (<https://tirto.id/Tambang-Nikel-Pulau-Wawonii-Konawe-Ditolak-Warga-Langgar-Uu-Elve>)
- Macionis, John J. 1999. *Sociology*. New Jersey: Prentice Hall.
- Prayogo, Dody. 2008. *Konflik Antara Korporasi Dengan Komunitas Lokal: Sebuah Kasus Empirik Pada Industri Geotermal Di Jawa Barat*. Depok: Fisip Ui Press.
- Salim dan Syahrums. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citra Media Pustaka
- Sukmana, Oman. 2003. *Teori Gerakan Sosial*. Malang: Umm Press.
- Tarrow, Sidney. 2008. *Charles Tilly And The Practice Of Contentious Politics. Social Movement Studies*, Vol. 7, No. 3, (December 2008), P. 225-246.